

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Implementasi Kebijakan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta

**(*Public Private Partnership*) dalam Pengelolaan Sampah di TPA
Jatibarang (Studi Kasus Kerjasama Pemkot Semarang dengan PT.
Narpati)**

Implementasi kebijakan kerjasama pemerintah dengan swasta (*public private partnership*) dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang untuk studi kasus kerjasama Pemkot Semarang dengan PT. Narpati dianggap belum optimal dalam pelaksanaannya, walaupun dalam beberapa aspek telah berjalan dengan baik dan sesuai. Adapun aspek-aspek yang dianggap masih belum sesuai dan belum berjalan dengan baik sehingga berakibat pada kurang optimalnya implementasi kebijakan kerjasama antara Pemkot Semarang dengan PT. Narpati dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang ini yakni mengenai ketepatan kebijakan dan ketepatan proses. Sedangkan aspek ketepatan pelaksana, ketepatan target dan ketepatan lingkungan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dalam mendukung pelaksanaan kebijakan kerjasama pemerintah dengan swasta (*public private partnership*) dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang untuk studi kasus kerjasama Pemkot Semarang dengan PT. Narpati.

Hal yang dianggap belum sesuai dalam implementasi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah ketika kebijakan ini secara keseluruhan

belum mampu memecahkan ataupun menyelesaikan masalah sampah yang ada di TPA Jatibarang secara 100%. Pengolahan sampah di TPA Jatibarang yang melalui kerjasama dengan PT. Narpati hanya sebatas mengolah sampah basah (sampah organik), dengan begitu hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kerjasama ini hanya membantu mengurangi sampah yang masuk ke TPA Jatibarang, bukan untuk menghilangkan permasalahan sampah di TPA Jatibarang secara *zero waste*. Selain itu, masih adanya pihak yang belum mampu memenuhi kewajiban yang sudah tertera dalam kontrak kerjasama menunjukkan masih adanya ketidaksiapan pihak tersebut dalam melaksanakan kebijakan kerjasama ini yang mengganggu proses kerjasama yang ada. Sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan kebijakan kerjasama anatar Pemkot Semarang dengan PT. Narpati dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang belum tepat kebijakan dan belum tepat proses.

5.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (*Public Private Partnership*)

dalam Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang (Studi Kasus

Kerjasama Pemkot Semarang dengan PT. Narpati)

a. Faktor Pendorong

Faktor yang dianggap sebagai faktor pendorong dalam implementasi kebijakan kerjasama pemerintah dengan swasta (*public private partnership*) dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang untuk studi kasus kerjasama Pemkot Semarang dengan PT. Narpati, yaitu karakteristik agen pelaksana dan disposisi pelaksana.

Karakteristik yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup selaku implementor dinilai sudah baik karena struktur birokrasi dari Dinas sudah cukup jelas dan terbagi sesuai urusan masing-masing, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan kerjasama dengan PT. Narpati dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang. Wewenang diberikan kepada seksi operasional bidang pengelolaan sampah dan khususnya dilaksanakan oleh UPTD TPA Jatibarang. Begitupula yang terjadi pada pihak pelaksana yang lainnya, yaitu PT. Narpati. Struktur kepengurusan dari PT. Narpati ini juga sudah cukup jelas dan terbagi sesuai bagiannya masing-masing. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan UPTD TPA Jatibarang serta PT. Narpati sebagai pelaksana kebijakan ini di lapangan sudah memiliki karakteristik yang baik yang dapat mendukung pengimplementasian kebijakan kerjasama anatar Pemkot Semarang dengan PT. Narpati.

Faktor lain yang menjadi faktor pendorong kebijakan kerjasama ini ialah disposisi pelaksana. Adanya komitmen yang baik dari kedua belah pihak, antara UPTD TPA dan PT. Narpati sebagai pelaksana di lapangan dalam mengolah sampah menjadi pupuk organik sudah sangat baik. Selain itu, intensitas keterlibatan para pelaksana terhadap kerjasama yang terbilang rutin ini memungkinkan kedua belah pihak menghadapi situasi dan tantangan yang ada tersebut agar kebijakan kerjasama ini dapat berjalan lancar sampai batas waktu yang telah ditentukan.

b. Faktor Penghambat

Faktor yang dianggap sebagai faktor penghambat dalam implementasi kebijakan kerjasama pemerintah dengan swasta (*public private partnership*) dalam

pengelolaan sampah di TPA Jatibarang untuk studi kasus kerjasama Pemkot Semarang dengan PT. Narpati diantaranya adalah standa dan sasaran kebijakan, sumberdaya, hubungan antar organisasi, kondisi sosial masyarakat.

Pada faktor ini dilihat dari aspek standar kebijakan, dimana ketidakadaannya SOP khusus kerjasama antara Pemkot Semarang dengan PT. Narpati untuk menjelaskan secara lebih rinci mengenai kebijakan kerjasama tersebut dapat menghambat pengimplementasian kebijakan kerjasama ini. Meskipun UPTD TPA telah menjalankan SOP pengelolaan sampah yang sudah ada, namun hal tersebut belum cukup menguatkan.

Selanjutnya pada faktor sumberdaya, dimana masih kurangnya kuantitas sumber daya manusia khususnya pada UPTD TPA Jatibarang yang hanya memiliki 16 orang pegawai yang terdiri dari kepala UPTD TPA 1 orang, operator alat berat 4 orang, operator jembatan timbang 2 orang, tenaga kebersihan 4 orang, penjaga (siang-malam) 2 orang dan koordinator lapangan 3 orang. Dengan jumlah pegawai yang hanya berjumlah 16 orang tersebut tidak sebanding dengan pekerjaan di TPA yang harus mengurus sampah sebanyak ± 900 ton yang masuk setiap hari ke TPA Jatibarang. Jumlah yang terbatas ini mengakibatkan kurang optimalnya penanganan sampah di TPA Jatibarang, termasuk menghambat dan mengganggu proses pemasokan sampah ke pabrik pupuk organik milik PT. Narpati

Kemudian, hambatan lainnya yang terjadi yaitu pada faktor hubungan antar organisasi. Terdapat permasalahan cukup pelik pada faktor ini yaitu permasalahan di dalam hubungan antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan PT. Narpati itu sendiri. Pada dasarnya tujuan yang paling

fundamental dalam suatu kerjasama adalah untuk memperoleh kemanfaatan bersama. Kedua belah pihak harus memperoleh kemanfaatan yang secara nyata dapat diperoleh. Namun dalam kasus kerjasama antara Pemkot Semarang dan PT. Narpati ini pihak pertama yang dalam hal ini adalah Pemkot Semarang tidak memperoleh haknya sehingga PT. Narpati ini melakukan wanprestasi terhadap kontrak kerjasama yang ada sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pengawas dan pengendali kerjasama harus memberikan surat peringatan kepada PT. Narpati hingga ketiga kalinya. Permasalahan tersebut yang hingga kini belum terselesaikan dapat menjadi titik penentu apakah kerjasama ini akan tetap berlangsung atau diputus. Berdasarkan hal tersebut faktor hubungan antar organisasi yang kurang baik dan tidak berjalan lancar ini sangat menghambat implementasi kebijakan kerjasama pemerintah dengan swasta (*public private partnership*) dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang untuk studi kasus kerjasama Pemkot Semarang dengan PT. Narpati.

Faktor terakhir yang termasuk penghambat implementasi kebijakan kerjasama pemerintah dengan swasta (*public private partnership*) dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang untuk studi kasus kerjasama Pemkot Semarang dengan PT. Narpati ini adalah faktor kondisi sosial masyarakat. Kelompok masyarakat pemulung dan sapi yang jumlahnya banyak di TPA Jatibaranag dapat mengganggu proses kerja operasional di lapangan. Keberadaan pemulung yang sering berkerumun dan juga sapi yang selalu berlalu lalang mengganggu truk sampah yang akan membuang muatannya Hal tersebut tentunya

dapat memperlama proses pemasokan sampah ke pabrik pupuk organik milik PT. Narpati.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap permasalahan mengenai Implementasi Kebijakan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (*Public Private Partnership*) dalam Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang (Studi Kasus Kerjasama Pemkot Semarang dengan PT. Narpati), maka peneliti di sini memberikan rekomendasi :

1. Dalam permasalahan Implementasi Kebijakan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (*Public Private Partnership*) dalam Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang (Studi Kasus Kerjasama Pemkot Semarang dengan PT. Narpati), direkomendasikan untuk : (1) Perlunya dibuat addendum kembali yang isinya menyesuaikan konteks permasalahan yang terjadi, yaitu solusi terkait permasalahan pembayaran kontribusi beserta dendanya oleh PT. Narpati kepada Pemkot Semarang agar permasalahan tersebut tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan kegagalan kerjasama nantinya. (2) Pihak Pemerintah harus lebih fasilitatif dan tanggap membantu pihak PT. Narpati karena pada dasarnya kerjasama dalam hal pengelolaan sampah ini merupakan hal yang bagus untuk Kota Semarang, sehingga apabila kerjasama ini berjalan baik maka Kota Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah dapat dijadikan model oleh daerah-daerah lain dalam hal kerjasama pengelolaan sampah dengan swasta. (3) Bisnis kerjasama terkait sampah bukanlah jenis bisnis yang

diminati dan bernilai keuntungan besar, maka pihak Pemerintah harus mendorong PT.Narpati sebagai pihak swasta yang mau bekerjasama dalam bidang sampah ini untuk terus bekerjasama mengelola sampah di TPA Jatibarang karena dalam kerjasama ini pihak Pemerintah adalah pihak yang lebih membutuhkan bantuan PT. Narpati.

2. Dalam permasalahan Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (*Public Private Partnership*) dalam Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang (Studi Kasus Kerjasama Pemkot Semarang dengan PT. Narpati), direkomendasikan untuk : (1) Dibuatnya SOP khusus tentang kerjasama antara Pemkot Semarang dengan PT. Narpati dalam hal pengolahan sampah menjadi pupuk organik agar pelaksanaan operasional kerjasama ini memiliki dasar kedudukan yang jelas sehingga dapat meminimalisir hambatan yang akan muncul. (2) Perlunya dibuat addendum kembali yang isinya menyesuaikan konteks permasalahan yang terjadi, yaitu solusi terkait permasalahan pembayaran kontribusi beserta dendanya oleh PT. Narpati kepada Pemkot Semarang agar permasalahan tersebut tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan kegagalan kerjasama nantinya. (3) Pihak Pemerintah harus lebih fasilitatif dan tanggap membantu pihak PT. Narpati karena pada dasarnya kerjasama dalam hal pengelolaan sampah ini merupakan hal yang bagus untuk Kota Semarang, sehingga apabila kerjasama ini berjalan baik maka Kota Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah dapat dijadikan model oleh

daerah-daerah lain dalam hal kerjasama pengelolaan sampah dengan swasta. (3) Pihak PT. Narpati tentunya dibantu oleh pihak UPTD TPA mengkoordinir para pemulung agar tidak selalu berkerumun sehingga mengganggu proses operasional di lapangan.